

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Di Indonesia, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada BAB 1 pasal 1 ayat 1-3. Dalam undang-undang tersebut UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha milik orang perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung dan tidak langsung dari Usaha Menengah yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun, terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan yang digunakan berbagai instansi di Indonesia, yaitu:

Menurut Keputusan Presiden No. 99 pengertian UMKM adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat (Jatmika, R., & Suryakencana, U, 2017)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja yaitu usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang (Jatmika, R., dan Suryakencana, U, 2017)

Tujuan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, kriteria UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 6 dibagi menjadi:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Meski begitu nominal yang tertera diatas dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu:

1. Usaha Sektor informal: UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. Usaha Mikro (*Micro Enterprises*): UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. Biasanya memiliki jumlah karyawan kurang dari 10.
3. Usaha Kecil (*Small Enterprises*): UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Mereka memiliki jumlah karyawan antara 10 hingga 49 orang.
4. *Fast Moving Enterprise*: UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Biasanya memiliki jumlah karyawan melebihi 50 orang.

### **2.1.2. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan catatan yang menjelaskan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan. Esensi laporan keuangan sangat penting mengingat laporan keuangan merupakan basis dari berbagai keputusan penting mengenai kelangsungan hidup dari entitas bisnis (Rianto dan Almurni, 2020).

Menurut PSAK No. 1 (2020: 2), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain

pengertian laporan keuangan dari PSAK, terdapat pengertian lain mengenai laporan keuangan menurut (Donald et al., 2019) dalam buku "*Intermediate Accounting*", menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan yang relevan tentang suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu, yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, perkembangan perusahaan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu. Laporan keuangan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis dan menginterpretasi suatu keputusan setelah selesai disusun.

Sebuah laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK 1 (2009) terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

a. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi aktiva (aset), liabilitas (hutang) serta ekuitas (modal) pada suatu periode tahun tertentu.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan alat yang digunakan bagi pemangku kepentingan atau manajemen untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih selama suatu periode akuntansi. Menurut SAK ETAP (2009) penjelasan dalam laporan laba rugi mencakup beberapa bagian yaitu pos penghasilan, beban yang diakui, komponen laba rugi dari yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak dan laba rugi bersih.

c. Laporan perubahan ekuitas

Menurut Syaiful Bahri (2016:143) laporan perubahan ekuitas merupakan komponen utama pada laporan keuangan, karena laporan ekuitas menunjukkan laba atau rugi selama periode pelaporan keuangan dengan melihat aktivitas transaksi modal dengan pemilik, distribusi kepada pemilik saldo akumulasi laba atau rugi dan akhir periode perubahannya, serta agio saham dan disagio saham.

Akan tetapi, penyajian laporan perubahan ekuitas harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.

d. Laporan arus kas

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan historis kas dan setara kas perusahaan, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode akuntansi, yang informasinya diperoleh dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penyajian informasi tentang komponen-komponen dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta informasi-informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan guna untuk memahami laporan keuangan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 (2020: 3) menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan ialah untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan, kinerja perusahaan, serta perkembangan perusahaan tersebut sehingga bisa merencanakan penggunaan keuangan untuk mengambil keputusan dan menjalankan keputusan tersebut dalam waktu yang akan datang

Menurut (Kasmir, 2018) laporan keuangan bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

### **2.1.3. Standar Akuntansi Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menurut (IAI, 2019) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu entitas dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan entitas tersebut (Uno M.O, 2019). SAK memberikan kerangka kerja yang jelas bagi penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan relevan. Hal ini mencakup komponen seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2019)

Tujuan ditetapkannya Standar Akuntansi Keuangan adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk umum. Menurut (Muslichah, 2018, hal. 20) tujuan tersebut adalah:

1. Menyediakan pelaporan keuangan yang konsisten, relevan dan andal
2. Memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan pedoman standar sehingga meminimalkan bias dari penyusunan.
3. Memudahkan auditor dalam mengaudit.
4. Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

### **2.1.4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)**

Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai tanggal 1

Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM ini dikarenakan terdapat kebutuhan terkait dengan adanya standar akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada. SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya. Tujuan diterapkannya SAK EMKM dalam laporan keuangan UMKM adalah untuk memberikan kemudahan penyusunan laporan keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2018). Adapun karakteristik dari laporan keuangan UMKM yang diatur dalam SAK EMKM adalah minimal terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada akhir setiap periode. Komponen yang harus ada dalam laporan posisi keuangan berdasarkan SAK EMKM (2018), yaitu:

- a. Kas dan Setara kas

Menurut PSAK No.2, Kas adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan umum (*cash on hand* dan rekening giro) yang ada pada perusahaan ataupun disimpan pada bank serta dapat dicairkan sewaktu-waktu. Setara kas menurut (Hery, 2017:179) adalah investasi jangka pendek yang dapat dicairkan menjadi uang kas dalam jangka waktu yang biasanya kurang dari 3 bulan (90 hari). Contoh paling umum dari setara kas adalah deposito berjangka 3 bulan.

b. Piutang

Suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan, yang timbul karena adanya penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh dari adanya transaksi ini adalah muncul nya akun piutang usaha dan wesel tagih.

c. Persediaan

Menurut PSAK No.14, persediaan adalah bentuk bahan baku atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan.

d. Aset Tetap

Menurut PSAK No.16, Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang masa gunanya lebih dari satu periode. Contoh dari aset tetap: mesin, tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan.

e. Utang Usaha

f. Utang Bank, dan

g. Ekuitas.

Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Ekuitas merupakan salah satu unsur dari laporan posisi keuangan perusahaan yang menunjukkan salah satu sumber aset yang dimiliki sebuah badan usaha, yaitu dari pemilik perusahaan dan dari akumulasi laba yang diperoleh selama suatu periode (IAI, 2018:3).

Dalam menyajikan laporan posisi keuangan tidak ada format atau urutan dari akun-akun di atas, tetapi untuk penyajian akun aset entitas dapat diurutkan berdasarkan likuiditas dan untuk akun liabilitas disusun berdasarkan jatuh tempo.



**PERUSAHAAN ABC**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 20XX**

	20XX
<b>ASET</b>	
Kas dan setara kas	XXX
Kas	XXX
Giro	XXX
Deposito	XXX
Jumlah kas dan setara kas	XXX
Piutang usaha	XXX
Persediaan	XXX
Beban dibayar dimuka	XXX
Aset tetap	XXX
Akumulasi penyusutan	(XXX)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXX</b>
<b>LIABILITAS</b>	
Utang usaha	XXX
Utang bank	XXX
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>XXX</b>
<b>EKUITAS</b>	
Modal	XXX
Saldo laba (defisit)	XXX
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>XXX</b>

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia SAK EMKM, 2018

**Gambar 2.1.** Format Laporan Posisi Keuangan berdasarkan SAK EMKM

## 2. Laporan Laba Rugi

Berdasarkan SAK EMKM yang berlaku, komponen laporan laba rugi terdiri dari:

### a. Pendapatan

Pendapatan merupakan arus masuk aset, peningkatan aset atau kombinasi dengan terjadi (munculnya) kewajiban entitas yang disebabkan oleh kegiatan operasional utama perusahaan (Hery, 2017:123). Pendapatan bisa disebut sebagai suatu perolehan kekayaan yang didapat dari penjualan produk ekonomik perusahaan selama periode pelaporan dalam rangka kegiatan usaha normal dalam bentuk kenaikan nilai aset.

### b. Beban keuangan

### c. Beban pajak

Penyajian laporan laba rugi dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan usaha dan sebagai indikator perusahaan untuk mengetahui usaha yang dijalankan mengalami kerugian atau keuntungan.

**PERUSAHAAN ABC**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX**

	<b>20XX</b>
<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan usaha	XXX
Pendapatan lain lain	XXX
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>XXX</b>
<b>BEBAN</b>	
Beban usaha	XXX
Beban lain-lain	XXX
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>XXX</b>
<b>LABA/RUGI SEBELUM PAJAK</b>	
<b>PENGHASILAN</b>	<b>XXX</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>XXX</b>
<b>LABA/RUGI SETELAH PAJAK</b>	
<b>PENGHASILAN</b>	<b>XXX</b>

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia SAK EMKM, 2018

**Gambar 2.2.** Format Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK EMKM

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan keuangan merupakan sebuah penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan ini sebagai bagian integral (satu kesatuan) yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya untuk periode waktu tertentu (Hery,2017:7). Menurut SAK EMKM (2018), catatan atas laporan keuangan memuat:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

<b>PERUSAHAAN ABC</b> <b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> <b>31 DESEMBER 20XX</b>
<p><b>1. UMUM</b></p> <p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta No. XX tanggal 1 Januari 20XX yang dibuat dihadapan Notaris, SH., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. XX 20XX tanggal 31 Januari 20XX. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Selatan</p> <p><b>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</b></p> <p><b>a. Pernyataan Kepatuhan</b></p> <p>Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p><b>b. Dasar Penyusunan</b></p>

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

**c. Piutang usaha**

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

**d. Persediaan**

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan actual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata

**e. Aset Tetap**

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

**g. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**3. KAS**

**20XX**

Kas kecil Jakarta – Rupiah

XXX

**4. GIRO**

**20XX**

PT BANK AAA Jakarta – Rupiah

XXX

**5. DEPOSITO**

**20XX**

PT BANK BBB – Rupiah	XXX
Suku Bunga – Rupiah	5,00%
<b>6. PIUTANG USAHA</b>	
	<b>20XX</b>
Toko A	XXX
Toko B	XXX
Jumlah	XXX
<b>7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA</b>	
	<b>20XX</b>
Sewa	XXX
Asuransi	XXX
Lisensi dan Perizinan	XXX
Jumlah	XXX
<b>8. UTANK BANK</b>	
<p>Pada tanggal 5 Maret 20XX, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank AAA dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 18 April 20XX. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entita</p>	
<b>9. SALDO LABA</b>	
<p>Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.</p>	
<b>10. PENDAPATAN PENJUALAN</b>	
	<b>20XX</b>
Penjualan	XXX
Retur Penjualan	XXX
Jumlah	XXX
<b>11. BEBAN LAIN LAIN</b>	
	<b>20XX</b>
Bunga Pinjaman	XXX
Lain –lain	XXX
Jumlah	XXX
<b>12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	

	<b>20XX</b>
Pajak Penghasilan	XXX

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia SAK EMKM, 2018

**Gambar 2.3.** Format Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh para pelaku UMKM dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK EMKM menjadi dasar penelitian ini untuk ditelaah lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ayu Trisnadewi dan Luh Putu Purnami (2022) yang berjudul *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Sari Mina Ayu* memperoleh hasil bahwa UMKM Sari Mina Ayu hanya melakukan pencatatan transaksi penerimaan, dan pengeluaran kas. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nurfadilah (2021) yang berjudul *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Warung Makan Mbak Rina* memperoleh hasil yang sama bahwa Pemilik Warung Makan Mbak Rina hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas harian sebagai laporan keuangannya karena minimnya pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Firdaus dan Ludacicus Sensi Wondabio (2017) dalam jurnal internasional yang berjudul *Financial Repost for Micro, Small, and Medium Enterprise According to Financial Accounting Standards: Case Study Rafita Cake* memperoleh hasil yang tidak jauh berbeda dimana subjek penelitian hanya membuat laporan keuangan sederhana berisi informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dibuat berdasarkan penerimaan penjualan dan catatan pengeluaran harian.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2018) menemukan kendala pada UMKM So Kressh bahwa dalam menyusun laporan keuangan masih menggunakan *single entry* atau metode pencatatan *cash basis* karena belum memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan yang sederhana sesuai standar yang berlaku untuk UMKM. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Neny Tri Indrianasari dan

Emmy Ermawati (2021) dalam jurnal internasional dengan judul “*Implementation of Technology Based SAK EMKM terhadap Joys Kitchen dan Rezky Photocopy*” juga memperoleh hasil yang sama bahwa pencatatan transaksi masih dilakukan secara tradisional atau manual karena belum ada nya SDM yang mengetahui pencatatan transaksi sesuai dengan SAK EMKM. Pada penelitian terdahulu lainnya dalam jurnal internasional yang dilakukan oleh Meilisa Ariani dan Yusuf (2023) dengan judul *Preparation of Financial Statements Based On Sak Emkm At Layangan Bayu Shop* juga memperoleh hasil yang sama bahwa Toko Layangan Bayu melakukan pencatatan atas transaksi yang sangat sederhana.

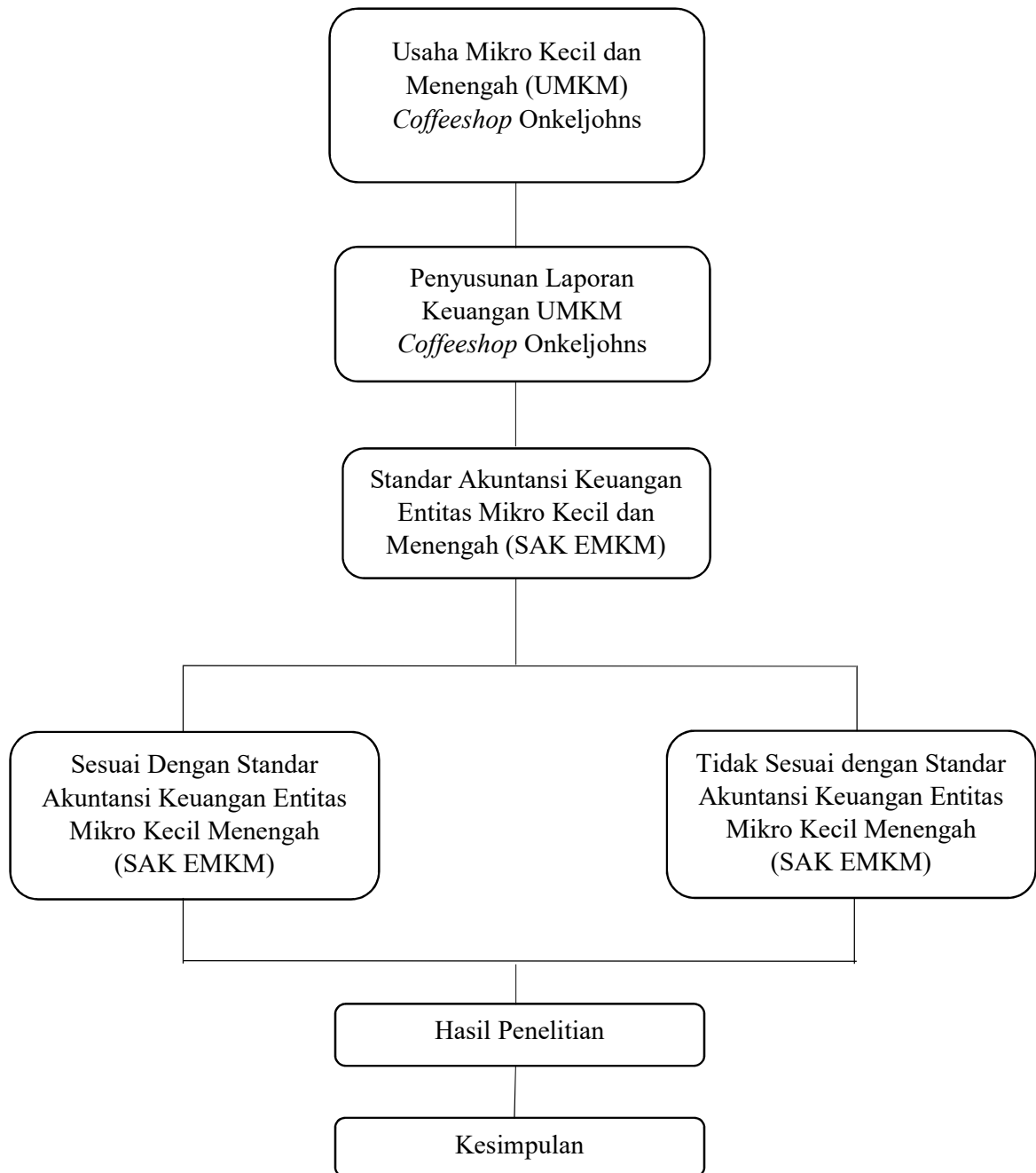
Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sulistia Suwondo (2021) yang berjudul Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM CV. NELL’Q Persada Mandiri yang belum sepenuhnya membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, subjek penelitian hanya membuat laporan keuangan berupa laporan laba rugi saja dan belum membuat laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Natasha Hilary Simanjuntak et al., (2020) yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus pada UMKM Restoran Delli Tomohon) menunjukkan hasil yang sama bahwa pihak Restoran Delli Tomohon belum sepenuhnya membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian, para pelaku usaha belum melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Sebagian besar penyebab dari penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar yang berlaku dikarenakan oleh pemahaman tentang SAK EMKM para pelaku usaha yang masih rendah, minimnya pemahaman tentang teknologi informasi akuntansi yang ada, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu usaha.

### **2.3. Kerangka Konseptual Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016), kerangka konseptual atau kerangka fikir adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori saling berhubungan dengan

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat penting. Kerangka penelitian di susun berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian yang berhubungan. Kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada Onkeljohns sebagai berikut:



**Gambar 2.4.** Kerangka Konseptual Penelitian.